

## GERAKAN TERORISME DALAM BINGKAI TEORI SOSIAL

Achmad Faesol (IDIA Prenduan)

### Abstrak:

Gelombang dukungan masyarakat atas eksistensi gerakan terorisme seperti *Islamic State of Irak and Syria* (ISIS) dari hari ke hari semakin meningkat. Kendatipun pemerintah beserta pihak-pihak terkait telah melakukan berbagai upaya deradikalisasi, namun benih-benih calon “mujtahid” baru selalu saja muncul bertebaran dimana-mana. Bagaimana fenomena ini bisa tumbuh, berkembang dan menyebar? Tulisan ini mencoba memberikan alternatif sudut pandang teoritis dari aspek sosiologis.

**Kata Kunci:** Paham Radikal dan Gerakan Terorisme

### Pendahuluan

Pada lebih dari satu dekade terakhir ini, tindakan terorisme berbasis gerakan keagamaan dengan segala bentuk latar historis, model gerakan dan kompleksitas permasalahan yang melatari semakin marak terjadi. Memang dalam perhitungan sejarahnya, tindakan terorisme tidak bisa dilepaskan dengan unsur agama. Bahkan semua agama-agama besar yang ada di muka bumi ini pernah dijadikan sebagai alat pembenar aksi terorisme oleh kelompok teroris.

Aksi terorisme dan konflik berkepanjangan di Irlandia Utara misalnya yang melibatkan agama Katholik dan Protestan. Konflik dan tindakan terorisme di Timur Tengah melibatkan agama Islam dan Yahudi. Sedangkan di kawasan Asia Selatan seperti India, Pakistan dan Srilangka melibatkan agama Islam. Adapun aksi terorisme di Jepang mencari akar pembenarnya pada ajaran Hindu dan Budha (Asfar, 2003).

Adapula gerakan ekstrimisme Sikh di India, Aum Shinrikyo di Jepang, Timothy McVeigh di Amerika, Irish Republican Army (IRA) di Irlandia Utara. Kemudian ada juga serangan Al-Qaeda ke World Trade Centre, aksi teror Al Qaeda for in The Islamic Maghreb (AQMI), Group Islamic Armed (GIA) di Al-Jazair, tindakan teror dari Moro Islamic Liberation Front (MILF), Abu Sayyaf Group (ASG) di Filipina, dan kelompok laskar i-Tayyiba di India (Golose, 2010). Dengan demikian semakin tampak jelas bahwa agama memang memiliki potensi yang luar biasa untuk dijadikan sebagai tenaga penggerak tindakan terorisme.

Aksi-aksi terorisme sering kali dikerucutkan pada suatu tindakan kekerasan yang menciptakan ketakutan di masyarakat. Adapun menurut Hoffman (dalam Golose, 2010), *terrorism is a purposeful human political activity which is directed toward the creation of general climate of fear, and is designed to influence, in ways desired by the protagonist, other human beings and though them, some course of events.*

Pada konteks Indonesia, kekerasan komunal (termasuk di dalamnya karena faktor agama) merupakan kekerasan dengan korban terbanyak dibanding dengan tiga kelompok kekerasan lainnya seperti kekerasan separatis, kekerasan negara-masyarakat dan kekerasan hubungan industrial (Tadjoeddin, 2002). Hal ini mengindikasikan bahwa realitas keberagaman manusia Indonesia memiliki potensi besar untuk diolah menjadi sumber lahirnya kelompok-kelompok ekstrimis yang menjadikan kekerasan fisik atas nama agama sebagai sarana dan media paling rasional dalam menuju arah perubahan.

### **Kerangka Pemikiran**

Tulisan ini berangkat dari sebuah asumsi sederhana bahwa keterlibatan masyarakat dalam aksi-aksi terorisme yang dalam hal ini berupa partisipasi aktif tidaklah berada dalam ruang kosong. Kemauan masyarakat untuk melibatkan diri berada dalam suatu habitus sosial tertentu yang sarat dengan kepercayaan, nilai dan norma-norma tertentu.

Artinya, praktik sosial berupa partisipasi masyarakat dalam aksi-aksi terorisme berada dalam konteks sosial tertentu dalam suatu masyarakat, karena masyarakat apapun tidak mungkin terorganisasi tanpa suatu “budaya” yang mengorganisasikan makna dan praktik sosial mereka sehari-hari (Faisal, 1998). Hal ini mengisyaratkan eksisnya “budaya” sebagai pilar bangunan struktur yang mengatur agen para pelaku praktik sosial sehari-hari.

Namun pada sisi yang lain, manusia juga diyakini bukanlah robot yang bergerak penuh dengan mekanistik. Manusia bukanlah hamba struktur yang pasif, namun manusia merupakan makhluk aktif yang senantiasa melibatkan pemaknaan dalam setiap tindakannya. Kendatipun dalam proses bertindak manusia mengacu pada aturan yang sama, akan tetapi pemaknaan pada tataran agen -individu- tidak akan sama.

Oleh karena itu, bagaimana suatu aturan dipraktikkan juga mungkin berbeda-beda pada situasi yang satu dengan situasi yang lainnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh takaran kualitas interpretasi dan beragam pertimbangan subjektif yang melekat pada diri pelaku (agen). Giddens (1984) mempertegas asumsi tersebut dengan menyatakan, *“to be a human being is to be a purposive agent, who both has reasons for his or her activities and is able, if asked to elaborate discursively upon those reasons”*.

Dua titik yang saling berseberangan di atas ingin menegaskan bahwa sebenarnya individu secara nyata ikut memproses “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang terstruktur. Aktor terlibat secara aktif dalam rangkaian proses menstruktur tatanan bayangan yang dimaksud. Kemudian secara bersamaan, struktur itu juga memproduksi tindakan sosial yang menstruktur.

Pendek kata, tindakan terorisme memang dibentuk oleh struktur -hal-hal di luar individu- yang berperan sebagai patokan umum bagi agen dalam bertindak, namun keberadaan struktur itu sendiri juga dibentuk oleh agen. Meminjam istilah Giddens, antara agen dan struktur, hubungan yang terjalin bukan dualisme melainkan dualitas. Struktur adalah medium dari agen, dan pada saat yang bersamaan struktur merupakan produk dari agen. Agen bukan sekedar mereproduksi struktur tapi juga memproduksi struktur.

Pernyataan Giddens tersebut menunjukkan bahwa suatu realitas sosial juga kental dengan dimensi subjektif pelaku. Selain itu, realitas sosial juga bersifat jamak tidak tunggal karena bergantung pada keragaman makna subjektif para agen. Realitas tersebut sesuai dengan Teori Strukturasi Giddens yang dalam tulisan ini dijadikan sebagai orientasi teoritis.

Keberadaan struktur ditempatkan sebagai “tatanan bayangan” dan “patokan umum” yang ikut dipertimbangkan oleh masyarakat dalam kerangka untuk ikut serta berpartisipasi. Apa yang seharusnya dikerjakan, kapan, oleh siapa, untuk tujuan apa dan bagaimana berpartisipasi tentunya tidak terlepas dari aturan-

aturan yang telah terstruktur sedemikian rupa, sesuai dengan lingkungan sosial budaya setempat. Para anggota masyarakat tentu tidak akan menutup mata terhadap hal-hal demikian, karena ketentuan-ketentuan itu bagian dari pola kehidupan yang telah dijalani selama ini.

Hal serupa juga terjadi dalam proses partisipasi masyarakat dalam aksi-aksi terorisme. Sebagai bentuk “tindakan sosial”, sikap berpartisipasi bukanlah terjadi dalam ruang kehidupan masyarakat yang hampa akan kebiasaan-kebiasaan umum. Kesiapan individu sebagai suatu komunitas tertentu -anggota kelompok- untuk berperan serta dalam proses aksi-aksi terorisme tidak bisa dilepaskan dari latar sosial budaya dimana dia hidup.

Realitas keikutsertaan masyarakat dalam mendukung aksi terorisme telah menjelma sebagai “pedoman” hidup yang baku dalam berinteraksi dengan anggota masyarakat lain. Keberadaan pedoman hidup ini akan senantiasa berperan untuk dijadikan bahan pertimbangan yang pada akhirnya menuntun perilakunya agar mengikuti pola baku kehidupan -sikap berpartisipasi- yang sudah berjalan selama ini sehingga kebiasaan mengikuti pola baku tersebut pada akhirnya akan terwarisi antar generasi.

Kemudian pada sisi yang lain, ketika masing-masing individu dalam komunitas ikut serta untuk berpartisipasi dalam aksi-aksi terorisme dimana sikap seperti ini telah menjadi “kebiasaan dan pematangan umum”, maka apa yang dilakukan olehnya itu sebenarnya telah melestarikan keberadaan “pola baku kehidupan” yang dimaksud. Fenomena ini semakin mempertegas bahwa kemauan untuk berpartisipasi merupakan produk dari tindakan yang dilakukan agen, namun pada waktu yang sama kebiasaan berpartisipasi itu sendiri juga berperan sebagai media yang mengkomodir tindakan individu.

Pemilihan Teori Strukturasi Giddens sebagai pijakan teoritis disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam mendukung eksistensi gerakan terorisme merupakan proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi ikut serta mengambil peran dan turut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil aksi-aksi terorisme. Namun perlu diperhatikan bahwa keterlibatan setiap individu dalam aksi-aksi terorisme tidak berada dalam ruang kosong, terjadi dengan sendirinya atau terbentuk karena satu faktor saja.

Keikutsertaan masyarakat dalam aksi-aksi terorisme adalah bentuk “pertemuan” dari dorongan internal (seperti kesadaran, keyakinan, persepsi dan pemaknaan) dan faktor eksternal (dogma organisasi, nilai, kultur, pengaruh media massa, kondisi sosial global, latar historis, dan suasana politik kebangsaan). Oleh karena itu wajar apabila kadar partisipasi setiap individu tidak akan sama baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan karena kemampuan, kesadaran dan pemaknaan tiap orang terhadap faktor eksternal juga berbeda-beda. Selain itu, harus disadari pula bahwa dorongan faktor internal juga tidak akan menghasilkan bentuk perilaku apapun tanpa adanya tekanan faktor eksternal yang bisa menjadi medianya. Pada tataran inilah Teori Strukturasi Giddens memiliki peran yang tepat dalam mengurai proses terbentuknya partisipasi masyarakat dalam aksi-aksi terorisme.

### **Rasionalitas Pemilihan Teori Strukturasi**

Pada bagian awal tulisan telah dijelaskan bahwa kajian teoritis ini mengambil posisi untuk memahami proses terbentuknya partisipasi masyarakat dalam aksi-aksi terorisme. Partisipasi masyarakat diasumsikan sebagai praktik sosial (dalam tulisan ini yang dimaksud praktik sosial adalah bergabung dengan kelompok-kelompok radikal) yang berulang dan karena itu, teori yang digunakan adalah Teori Strukturasi Giddens.

Teori Strukturasi Giddens yang dipakai sebagai pisau analisa penelitian merupakan sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur dengan pusat perhatian pada praktik sosial yang berulang (Ritzer, 2005). Oleh karenanya, dalam kaca mata teori ini antara agen dan struktur tidak berdiri sendiri dan terpisah antara satu dengan yang lain, namun terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Relasi dualitas antara agen dan struktur terjadi dalam praktik sosial yang berulang dan terpola dalam lintas ruang dan waktu (Priyono, 2002).

Pada tataran teoritis, konsep pertautan antara agen dan struktur sebenarnya telah banyak melahirkan aktor-aktor intelektual seperti Anthony Giddens, Arcehr, Pierre Bourdieu, Jurgen Habermas dan George Ritzer. Pada deretan nama-nama tersebut, selain memiliki perbedaan istilah teoritis, masing-masing tokoh juga memiliki perbedaan substansial dalam bangunan konsep teoritisnya. Pada konteks rasionalitas teori dalam tulisan ini, maka Teori Strukturasi Giddens

akan disandingkan dengan Teori Strukturalisme Konstruktivis Bourdieu sebagai label orientasi teoritisnya.

Agen menurut Bourdieu yang didominasi oleh habitus lebih bersifat mekanis dibanding dengan konsep agen menurut Giddens. Agen menurut Giddens mungkin saja tidak mempunyai tujuan dan kemauan bebas, namun memiliki lebih banyak kekuasaan dari pada agen menurut Bourdieu. Seperti diketahui bersama bahwa agen Bourdieu lebih didominasi oleh kebiasaannya atau oleh struktur internal, sedangkan agen dalam karya Giddens adalah pelaksanaannya tindakan.

Agen dalam konsep Giddens mempunyai beberapa pilihan, setidaknya berpeluang untuk bertindak berbeda-beda dari yang seharusnya dilakukan. Agen menurut Giddens memiliki kekuasaan sehingga memungkinkan mereka untuk menciptakan pertentangan dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, agen menurut Bourdieu adakalanya merupakan habitus terpisah yang terlibat dalam hubungan dialektika dengan dunia eksternal (Ritzer, 2005).

Berangkat dari konsep Giddens tentang agen di atas, maka dirasa tepat jika Teori Strukturasi Giddens digunakan sebagai pijakan analisa dalam rangka mengkaji pertautan agen struktur dalam konteks partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mendukung eksistensi gerakan terorisme. Teori strukturasi memfokuskan analisisnya pada proses produksi dan reproduksi dalam praktik sosial. Termasuk juga memberikan perhatian kepada makna-makna dari kondisi material yang muncul dalam kehidupan sosial, lebih memperhatikan motif maupun berbagai alasan dan bukan akibat dari tindakan. Sedangkan pembagian kekuasaan dan perbedaan kepentingan dianjurkan untuk diabaikan (Maliki, 2003).

Dengan memiliki motivasi dalam bertindak, maka motivasi pada dasarnya meliputi keinginan dan hasrat yang mendorong tindakan. Jadi, motivasi menyediakan rencana menyeluruh untuk bertindak. Tetapi menurut Giddens, sebagian besar tindakan tidak dimotivasi secara langsung. Kendatipun tindakan tertentu tidak dimotivasi dan motivasi umumnya tidak disadari, namun motivasi memainkan peran penting dalam tindakan manusia (Ritzer, 2005).

Oleh karena itu, untuk terjun dalam praktik sosial seorang aktor -pelaku harus mengetahui cara berpartisipasi sesuai konteks dan cara mengikuti suatu peraturan. Pengetahuan itulah yang disebut dengan kesadaran praktis

yang dibedakan menjadi kesadaran diskursif dan ketidaksadaran. Partisipasi aktor dalam kehidupan praktis berdasarkan pengetahuan tentang bagaimana mengikuti aturan ini disebut Giddens dengan sifat kehidupan *sosial recursive* (Maliki, 2003).

Secara lebih lanjut Giddens membedakan tiga dimensi internal pelaku dalam motivasi tak sadar, kesadaran praktis dan kesadaran diskursif. Motivasi tak sadar menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri. Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan agen.

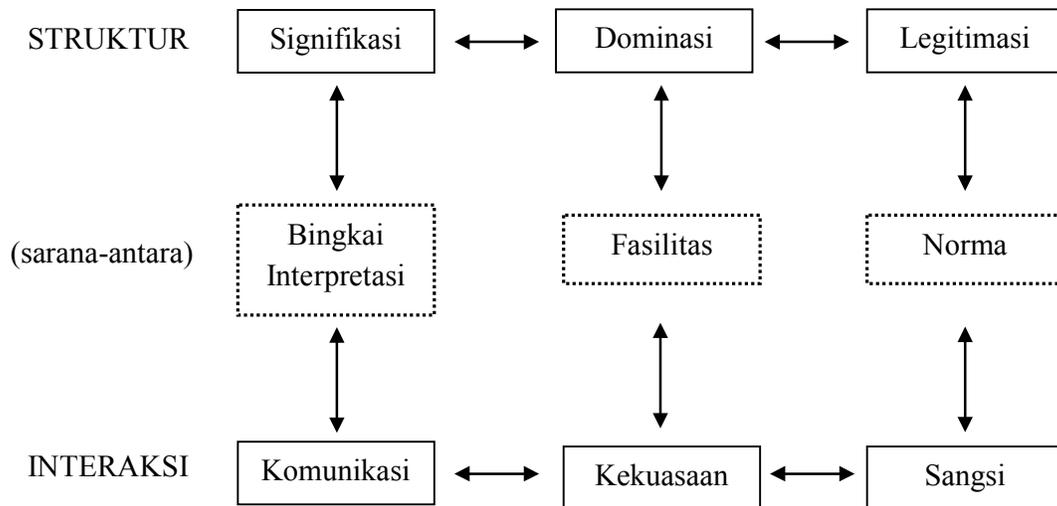
Adapun kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Kesadaran praktis inilah yang merupakan kunci untuk memahami proses bagaimana berbagai tindakan dan praktik sosial kita lambat laun menjadi struktur, dan bagaimana struktur itu mengekang serta memungkinkan praktik sosial (Priyono, 2002).

Seperti pernyataan di awal bahwa ada hubungan dualitas antara agen dan struktur yang menegaskan bahwa konstitusi agen dan struktur bukan merupakan dua kumpulan fenomena biasa yang berdiri sendiri (dualisme), tetapi mencerminkan dualitas (saling berhubungan). Ciri-ciri struktural sistem sosial adalah sekaligus medium dan hasil praktik sosial yang diorganisir berulang-ulang atau momen produksi tindakan juga merupakan salah satu reproduksi dalam konteks pembuatan kehidupan sosial sehari-hari. Strukturasi meliputi hubungan dialektika antara agen dan struktur, struktur tidak akan pernah ada tanpa keagenan dan begitu juga sebaliknya (Ritzer, 2005).

Struktur itu sendiri dalam prinsip struktural terdapat tiga gugus besar yakni signifikasi, dominasi dan legitimasi (Karnaji, 2009). Signifikasi atau penandaan menyangkut dengan pemaknaan, simbolik, penyebutan dan wacana. Struktur dominasi atau penguasaan mencakup ranah penguasaan atas orang (politik) dan penguasaan atas barang (ekonomi). Sedangkan struktur yang ketiga adalah legitimasi atau pembenaran yang menyangkut peraturan normatif yang terungkap dalam tata hukum (Hendry, 2002). Dalam praktik sosial, ketiga gugus prinsip struktural tersebut saling terkait satu sama lain. Struktur signifikasi pada gilirannya juga mencakup struktur dominasi dan legitimasi. Kalau dibuat skema hubungan antara ketiga gugus besar struktur tersebut, maka akan tampak sebagai berikut:

Gambar 1

## Hubungan Antara Tiga Gugus Struktur



Adanya keterkaitan antara agen dan struktur tersebut semakin menegaskan bahwa suatu kelompok masyarakat (gerakan radikal) sebenarnya secara terus menerus diproduksi oleh orang-orang yang berinteraksi dalam masyarakat itu sendiri. Suatu struktur sosial mengkonstitusi atau memproduksi tindakan, namun pada saat yang sama ia juga dikonstitusi atau diproduksi oleh tindakan. Oleh karenanya, suatu struktur bukan semata-mata sebagai sumber kendala bagi agensi manusia, tapi juga sekaligus sebagai peluang (Maliki, 2003).

Teori Strukturasi yang ditawarkan Giddens akan sangat relevan dalam rangka memahami relasi dialektikal antara agen dan struktur dalam suatu komunitas masyarakat, misalnya fenomena sosial dalam lingkup organisasi atau komunitas pada lokasi tertentu. Hal ini disebabkan karena konsep Teori Strukturasi yang dihasilkan oleh sifat dualitas struktur memang relatif mudah ditemukan pada tataran realitas di level menengah. Pada ranah semacam ini, maka sangat memungkinkan untuk melakukan kajian ilmiah atas keberadaan suatu struktur sebagai medium yang sekaligus sebagai hasil dari agensi.

Menurut Giddens sendiri (1991), Teori Strukturasi merupakan label untuk meletakkan kepeduliannya dalam upaya mengembangkan suatu kerangka pemikiran ontologis bagi kepentingan pengkajian terhadap aktivitas-aktivitas sosial manusia. Teori ini berbicara tentang hakekat tindakan manusia, institusi sosial, serta hubungan antar tindakan dan institusi. Secara tegas Giddens menolak

dualisme subyek dan obyek, atau antara agen dan struktur dalam praktik dan tindakan sosial. Sebagai gantinya, Giddens menawarkan konsep dualitas antara agen dan struktur yang merupakan konsep sentral Teori Strukturasi.

Menurut teori ini, hubungan antara agen dan struktur tidak bersifat dualisme melainkan dualitas. Oleh karena itu, suatu struktur dalam kenyataannya tidak hanya membentuk tatanan tindakan (agen) sehari-hari, namun juga dibentuk oleh tatanan agen itu sendiri. Giddens menyebutnya dengan istilah struktur merupakan medium dan sekaligus pula produk dari agen.

### **Paham Radikal dan Tindakan Terorisme dalam Kajian Teori Sosial**

Selain Teori Strukturasi Giddens, teori makro dan mikro dalam ranah ilmu sosial sebenarnya dapat pula dijadikan sebagai dasar analisis dalam upaya pelacakan terhadap kekerasan yang dimotori agama. Teori makro yang lebih berfokus pada struktur sosial masyarakat dan mikro yang cenderung pada individu, keduanya akan berintegrasi untuk dapat menampilkan kajian yang utuh seputar permasalahan yang dikaji.

Kerangka analisis struktural, salah satunya didukung oleh Teori Konflik Dahrendorf menyatakan bahwa konflik kepentingan dalam asosiasi selalu ada sepanjang waktu, antara pihak sub ordinat dan super ordinat. Kepentingan keduanya adalah objektif dalam arti bahwa kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi. Setelah kelompok konflik muncul, kelompok tersebut akan melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Apabila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal dan jika konflik disertai tindakan kekerasan akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba (Ritzer, 2005).

Dalam tataran agen, kekerasan dipahami sebagai suatu tindakan individu yang dilakukan dengan sadar dan sengaja untuk memproduksi serta mentransformasi secara otonom tindakan dan aksi politik kolektif. Tindakan ini dipahami sebagai produk pilihan rasional seseorang. Oleh karena itu, penjelasan terhadap kekerasan kolektif selalu melihat faktor-faktor dari dalam pelaku kekerasan dan mengabaikan faktor dan kendala struktural serta proses-proses sosial lainnya, demikian menurut Rule (dalam Asfar, 2003).

Dari sudut pandang di atas, maka wacana kekerasan kolektif akan menciptakan ruang penilaian untuk menempatkan kekerasan sebagai sesuatu

yang bersifat inherensi atau kontingensi, yakni perdebatan teoritis tentang fenomena kekerasan kolektif itu berada dalam tataran agen atau struktur.

Pada ranah mikro dalam konteks kekerasan atas nama agama, maka agama cenderung lebih dipahami sebagai sistem simbol dan sistem makna. Sebagai sistem makna, agama memberikan legitimasi teologis atas tindakan-tindakan kekerasan pada konteks tertentu. Demikian pula dengan sistem simbol, agama mampu meneguhkan identitas-identitas tertentu bagi pemeluknya sebagai penganut agama yang sejati. Dua sistem tersebut menjadi sumber legitimasi dari tindakan kekerasan yang dilakukan (Nurhakim, 2008).

Sebaliknya menurut Sztompka, dalam tataran struktur, kekerasan dipahami sebagai hasil dari proses hubungan-hubungan sosial atau struktur dimana para pelaku tersebut berada. Nilai dan norma dipandang sebagai imperatif struktural yang terinternalisasi dalam diri individu sehingga orang berperilaku selaras dengan atau fungsional terhadap sistem. Oleh karenanya, penjelasan terhadap kekerasan kolektif selalu dilihat dari faktor-faktor luar para pelaku kekerasan dan mengabaikan faktor minat, motivasi dan strategi. Tindakan agen dalam bentuk kekerasan kolektif dianggap tidak lebih dari artefak atau produk struktur (dalam Asfar, 2003).

Dari sini dapat dipahami bahwa kelompok Islam radikal melihat pertarungan ideologi belum selesai. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa ideologi liberal atau kapitalisme itu hanyalah ciptaan manusia yang lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaat. Dalam pandangan mereka, hanya Islam yang mampu menandingi ideologi barat seperti itu.

Ada dua variabel penting yang membentuk gerakan-gerakan radikal dalam kalangan Islam, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor dari dalam lebih banyak berkaitan dengan penafsiran konsep jihad yang dipahami sebagai perang terhadap non Islam. Mereka selalu melihat dunia dengan dua sisi saja, hitam-putih, baik-buruk dan muslim-non muslim. Adapun faktor ekstern merupakan reaksi terhadap modernisasi yang dilakukan oleh barat terhadap dunia Islam. Pada konteks kekinian, radikalisme di kalangan sebagian penganut Islam didorong oleh kondisi sosial ekonomi internasional yang dianggap tidak adil bagi kaum muslimin.

Radikalisme Islam dipahami sebagai reaksi atas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, yakni sebuah konspirasi untuk menghambat

perkembangan agama dan gerakan-gerakan Islam yang melibatkan kekuatan antar negara dengan disponsori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (Asfar, 2003).

Berawal dari dua sebab tersebut maka muncullah gerakan terorisme. Pada konteks Indonesia, ada dua faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih untuk dijadikan sebagai sarang teroris, yaitu situasi politik pasca runtuhnya rezim orde baru membuka ruang begitu luas bagi berkembangnya radikalisme agama. Adapun faktor yang kedua adalah lemahnya sistem kepemimpinan pemerintahan (Sirry, 2003).

Menurut Huntington (dalam Arifin, 2007), jatuhnya rezim orde baru merupakan tahapan pertama dari proses perkembangan demokrasi. Sedangkan tahapan kedua dan ketiga adalah masa transisi dan konsolidasi demokrasi. Dengan demikian, Indonesia pada saat ini sedang berada pada tahapan transisional. Ada pandangan bahwa masa ini merupakan masa krisis karena demokrasi belum menemukan bentuk yang ideal sehingga momen inilah yang dimanfaatkan untuk menabur benih-benih terorisme di Indonesia.

Adanya dua faktor di atas menjadikan tindakan-tindakan terorisme di Indonesia semakin mudah untuk dilakukan. Bagi pelaku aksi teroris, tindakan kekerasan yang seringkali membawa korban sipil tidak perlu diakui sebagai tindakan kejahatan melawan kemanusiaan apalagi sampai melanggar hak asasi manusia. Namun, tindakannya diyakini sebagai bagian dari tugas suci agama, atau yang disebut Magnus Ranstorp dengan istilah *terrorism in the name of religion* (dalam Jainuri, 2003). Dengan cara pandang seperti ini maka wajar apabila warga sipil yang menjadi korban kekerasan dianggap sebagai bagian atau resiko dari proses perjuangan dan hal tersebut (jatuhnya korban sipil) bukanlah suatu dosa besar.

Dengan menjadikan agama sebagai sumber legitimasi, maka semua aktifitas teror yang mengerucut pada tindakan kekerasan semakin diyakini sebagai satu-satunya jalan kebenaran. Aksi kekerasan yang dilakukan atas nama agama biasanya muncul akibat adanya pemahaman keagamaan yang bercorak skriptural, yakni berdasarkan penafsiran teks semata tanpa mengkaitkannya dengan konteks yang melatari. Pemahaman seperti ini melahirkan sikap fanatik dan militan yang berujung pada pandangan bahwa hanya dia dan kelompoknya *an sich* yang benar.

Tetapi sikap seperti ini belum cukup untuk melahirkan aksi-aksi terorisme. Sikap tersebut akan mengarah kepada tindakan terorisme ketika terdapat lingkungan sosial politik yang dianggap menekan dan tidak benar sehingga harus diganti dengan lingkungan sosial politik yang benar-benar dirahmati oleh Tuhan.

Aksi terorisme macam ini tidak terlepas dari krisis-krisis yang melingkupinya seperti krisis sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan spiritual. Krisis seperti itu dipercepat dengan fenomena “satu dunia” setelah berakhirnya perang dingin pada 1990an. Fenomena ini dianggap oleh sebagian penganut agama-agama sebagai ancaman serius terhadap identitas mereka.

Dalam konteks ini, munculnya gerakan terorisme berbasis paham keagamaan merupakan bagian dari upaya defensif untuk mempertahankan identitas mereka. Adanya fenomena satu dunia yang memperkuat proses sekularisasi dianggap sebagai ancaman serius dan harus dilawan. Kelompok-kelompok terorisme keagamaan dalam hal ini memiliki visi serupa, yakni melakukan perlawanan secara *all out* terhadap sekularisasi baik dari dalam maupun dari luar, demikian menurut Maqnuus Ranstorp (dalam Asfar, 2003).

Adapun gerakan terorisme yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia yang melibatkan insan pesantren dalam aksinya di lapangan berimplikasi terhadap munculnya stigma negatif tentang pesantren saat ini. Munculnya orang pesantren sebagai aktor penting di balik tragedi bom Bali yang menewaskan ratusan warga sipil membuat pesantren menjadi sorotan tajam dari semua kalangan. Tuduhan sebagai sarang pemberontak sekarang berubah menjadi pesantren sebagai sarang teroris (Turmudi, 2005). Padahal, sepanjang sejarah bangsa ini berdiri pesantren memiliki kontribusi signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

### **Terorisme Sebagai Gerakan Sosial**

Adalah Blumer (dalam Sztompka, 2005) yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan baru. Sebagai tindakan kolektif maka gerakan sosial merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri termasuk segmen anggotanya. Karena itu, dalam keanggotaannya gerakan sosial terjadi dalam masyarakat dan bertindak terhadap masyarakat dari dalam.

Sebagian besar perubahan yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah perubahan internal dalam gerakan sosial itu sendiri (anggota, ideologi, hukum, pranata, bentuk organisasi dan sebagainya) dan perubahan eksternal dalam masyarakat lebih luas yang ditimbulkan oleh umpan balik gerakan terhadap anggotanya dan struktur itu sendiri.

Salah satu hal yang mendasari terbentuknya gerakan sosial adalah fundamentalisme agama yang pada akhirnya mudah untuk menciptakan tindakan kekerasan kolektif atas nama agama. Fundamentalisme agama dikategorikan sebagai kelompok gerakan sosial karena memiliki tiga ciri yakni *pertama*, gerakan fundamentalisme melibatkan banyak orang dan jaringan yang cukup luas sehingga bisa disebut sebagai tindakan kolektif. *Kedua*, gerakan fundamentalisme memiliki ideologi yang meliputi tujuan gerakan, kumpulan doktrin, mitos gerakan, taktik dan penilaian terhadap struktur yang hendak dirubah. *Ketiga*, gerakan fundamentalisme tidak lahir dalam ruang kosong akan tetapi ada faktor luar yang mempengaruhi kelahirannya (Jainuri, 2003).

Dengan memahami tindakan terorisme yang dasar pembentuknya adalah pandangan radikal atas agama, maka terorisme dapat dimaknai sebagai gerakan sosial sehingga penelusuran ruang gerak secara global gerakan ini akan mudah untuk dilakukan. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa meskipun beberapa negara di dunia telah menyatakan diri perang melawan terorisme, tetapi terorisme tetap hidup dan ancamannya semakin menakutkan (Adjie, 2005). Ini pertanda bahwa terorisme tidak mungkin dimonopoli oleh satu negara *an sich* melainkan keanggotaannya diyakini melibatkan jaringan beberapa negara.

Keyakinan tersebut semakin dipertegas oleh Juergensmeyer (2003) bahwa terorisme selalu melibatkan komunitas dan jaringan organisasi yang cukup besar untuk melakukan sebuah keberhasilan aksinya. Dengan jaringan yang luas dalam skala lintas negara, maka aksi-aksi kekerasan yang dijalankan semakin rapi dan terorganisir. Terlebih setiap bagian dari gerakan terorisme ditangani oleh negara-negara tertentu dengan spesialisasi khusus.

Maka harus dipahami sekarang bahwa terorisme telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional tiap negara. Negara besar adalah sponsor utama terorisme internasional. Kelompok teroris barang kali dari salah satu negara, dibiayai oleh negara kedua, dilatih oleh negara ketiga, diberi perlengkapan oleh negara keempat dan beroperasi di negara kelima (Adjie, 2005). Dengan adanya pembagian tugas yang begitu rapi, wajar apabila

eksistensi gerakan terorisme hingga kini masih kuat. Terlebih lagi untuk menambah jumlah sumber daya manusia, terorisme menggunakan dalih agama sebagai alat perekatnya.

Agama merupakan wahana yang sangat efektif untuk memobilisasi masa. Keefektifan ini tergantung pada kondisi yang dialami masyarakat. Agama akan mudah menjadi media mobilisasi guna mencapai tujuan negatif (seperti penyebab konflik) apabila masyarakat mengalami ketidakberdayaan ekonomi dan politik (Soetrisno, 2003). Kondisi sosial politik dan ekonomi yang lemah memberikan dukungan ruang yang penuh terhadap aktor-aktor teroris untuk melakukan perekrutan anggota baru.

Perekrutan sumber daya manusia menjadi hal urgen sebagai tempat menebar benih-benih perjuangan. Pada anggota baru inilah motor gerakan diharapkan mampu terus berjalan sepanjang waktu. Dengan menyadari peran penting dari keberadaan anggota baru, maka proses penambahan anggota menjadi salah satu bagian vital dalam gerakan terorisme. Para individu-individu tertentu perlu dimobilisasi untuk berperan aktif dalam aktivitas-aktivitas yang membentuk bagian dari strategi dan taktik sebuah organisasi gerakan (Mirsael, 2004). Individu ini akan dicetak menjadi anggota baru yang militan, oleh karena itu anggota yang terpilih bukanlah orang sembarangan, namun ada proses seleksi dan kriteria khusus yang diharapkan menjadi bagian dari perjuangan gerakan.

Sebagai suatu bentuk gerakan perubahan, kelompok terorisme pada umumnya lebih cenderung untuk merekrut anak-anak muda yang masih belum memiliki bangunan pemikiran yang mapan. Pemilihan ini disebabkan karena kecemasan anak-anak muda terhadap karir, lingkungan sosial, hubungan seksual dan pengalaman-pengalaman dihinakan dalam masalah-masalah tersebut membuat mereka mudah terserang oleh pengaruh-pengaruh pemimpin yang kuat (Juergensmeyer, 2003). Dengan segmentasi anggota baru yang difokuskan pada generasi muda untuk ditanami pola nilai-nilai loyalitas gerakan, maka langkah penyelamatan terhadap eksistensi gerakan terorisme telah terjadi.

#### Penutup

Aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama tidak bisa diremehkan lagi. Eksistensi gerakan terorisme telah teruji dalam lintasan waktu seiring dengan semakin bertambahnya anggota baru. Adapun Indonesia adalah salah satu negara potensial penyumbang sumber daya manusia. Sebabnya sederhana karena

dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan dengan dasar beragama Islam yang masih dominan sebagai bungkus sosial saja, maka peluang merekrut anggota baru dari negeri ini masih sangat besar.

Proses perekrutan anggota baru tidaklah terjadi dengan sendirinya. Tapi ia lahir dari “rahim” pola interaksi sosial tertentu masyarakat. Dalam “rahim” tersebut terkumpul aneka macam dogma, pemahaman keagamaan, keyakinan individu, kultur keagamaan, pengaruh media masa, kondisi sosial politik global beserta segenap kompleksitas faktor pendukung lainnya. Realitas terorisme ini mengisyaratkan satu hal bahwa kajian tentang tumbuh suburnya paham radikal dan gerakan terorisme sebenarnya tidak bisa didekati –apalagi mau diselesaikannya dengan sudut pandang keilmuan yang parsial *an sich*, tapi harus universal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie. 2005. *Terorisme*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Arifin, Syamsul. 2007. *Pelebagaan Demokrasi dan Penguatan Civil Society Melalui Pendidikan: Harapan Terhadap Pesantren*. Edukasi; Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan. Volume 5 No. 2.
- Asfar, Muhammad. 2003. *Islam Lunak Islam Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*. Surabaya: JP Press.
- Faisal, Sanapiah. 1998. *Budaya Kerja Masyarakat Petani; Kajian Strukturasionistik Berdasarkan Kasus Petani Sumbawa*. Disertasi S-3 Ilmu Sosial tidak dipublikasikan. Universitas Airlangga Surabaya.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration*. Berkeley: University of California Press.
- Giddens, Anthony. 1991. *Structuration Theory: Past, Present and Future*, dalam Bryant, Cristhoper GA dan Jary, David (Ed), *Giddens' Theory of Structuration: A Critical Appreciation*. London: Routledge.
- Golose, Petrus Reinhard. 2010. *Deradikalisasi Terorisme; Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK
- Jainuri, Ahmad dkk. 2003. *Terorisme dan Fundamentalisme Agama; Sebuah Tafsir Sosial*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Juergensmeyer, Mark. 2003. *Terorisme Para Pembela Agama*. Yogyakarta: Terawang Press.

- Karnaji. 2009. *Sektor Informal Kota: Analisis Teori Strukturasi Giddens (Kasus Pedagang Pasar Keputran Kota Surabaya)*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. Vol. XXII, No. 4, Oktober – Desember 2009
- Maliki, Zainuddin. 2003. *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM
- Mirsel, Robert. 2004. *Teori Pergerakan Sosial; Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Nurhakim, Moh. 2008. *Analisis Hubungan Doktrin dan Fenomena Radikalisasi Gerakan “Laskar Jihad”*. Jurnal Bestari; Beramal Dan Beramal Dengan Semangat Mentari. Volume XXI No. 39.
- Priyono, Henry. 2002. *Anthony Giddens Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana
- Sirry, A Mun'in. 2003. *Membendung Militansi Agama, Iman dan Politik Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Soetrisno, Loekman. 2003. *Konflik Sosial; Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tajidu Press.
- Sztompka, Piotr. 2005. Penj. Alimandan. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Tadjoeddin, Zulfan Muhammad. 2002. *Anatomi Kekerasan Sosial Dalam Konteks Transisi; Kasus Indonesia 1990-2001*. [www.unsfir.or.id](http://www.unsfir.or.id).
- Turmudi, Endang dan Sihbudi, Reza. 2005. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.